

Antroposentrisme, Teknokrasi, dan Krisis Pembangunan: Menuju Paradigma Teosentris

Wilhelmus Kelvin^{1,*}, Eugenius M Darmawan²

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

² Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

* corresponding author: kelvinwilhelmus87@gmail.com;
gegedarmawan61@gmail.com

Disubmit: 03-04-2025; Direvisi: 31-05-2025; Disetujui: 02-06-2025

Abstract

The growing global ecological crisis raises a fundamental question: why do modern development models often accelerate environmental degradation rather than mitigate it? This paper aims to examine the hidden technocratic rationality underlying modern development models that tend to neglect environmental sustainability. Using a descriptive qualitative method, this study traces the roots of the ecological crisis, which is indicated as a consequence of development approaches focused solely on economic growth without regard for the integrity of creation. The utilitarian character of technocratic rationality has reinforced a development paradigm that instrumentalizes nature. Moreover, the anthropocentric worldview within the Church's theological tradition—which places humans at the center of creation—has exacerbated the crisis. This study proposes a paradigm shift toward theocentrism as an alternative approach. Theocentrism emphasizes the integration of creation and the sustainability of human-nature relations as an essential dimension of living faith. The findings highlight the urgency of theological transformation in responding to the ecological crisis and call for the emergence of a new ecological culture rooted in creation-centered spirituality.

Keywords: *ecological crisis; technocracy; anthropocentrism; theocentrism; theology of creation.*

Abstrak

Krisis ekologis global yang kian mengkhawatirkan menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa berbagai model pembangunan modern justru mempercepat degradasi lingkungan alih-alih meredamnya? Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji rasionalitas teknokrasi yang tersembunyi di balik model pembangunan modern yang cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelusuri akar krisis ekologis global yang diindikasikan sebagai akibat dari pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan ciptaan. Rasionalitas teknokratis yang bersifat utilitarian telah mengukuhkan paradigma pembangunan yang menginstrumentalisasi alam. Selain itu, cara pandang antroposentris dalam tradisi teologi Gereja, yang menempatkan manusia sebagai pusat ciptaan, turut memperparah krisis ini. Penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma menuju teosentrisme sebagai pendekatan alternatif. Teosentrisme menekankan integrasi ciptaan dan keberlanjutan relasi manusia dengan alam sebagai bagian dari iman yang hidup. Temuan ini menunjukkan pentingnya transformasi teologis dalam menghadapi krisis ekologis dan mendorong lahirnya budaya ekologis baru yang berbasis spiritualitas penciptaan.

Kata Kunci: *krisis ekologis; teknokrasi; antroposentrisme; teosentrisme; teologi ciptaan*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan menjadi alasan utama mengapa pembangunan terus dilakukan, sehingga pembangunan menjadi agenda bersama semua pihak, bukan hanya tugas pemerintah (Giri & Ufford, 2004). Karena itu, setiap proses pembangunan perlu dikawal agar tetap berjalan pada jalur yang benar, terutama agar tidak merusak lingkungan hidup.

Pertanyaan penting yang muncul adalah: apakah memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup akan menghambat pembangunan? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan apakah ada hubungan antara pembangunan dan

penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi sangat relevan. Tidak bisa disangkal bahwa sering kali, lingkungan menjadi korban dari pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Papua meningkat 4,9%, tetapi pada saat yang sama, terjadi peningkatan besar-besaran dalam kegiatan tambang emas dan tembaga yang merusak alam (Bappenas, 2024). Selain itu, WHO pada tahun 2017 mencatat bahwa Jakarta dan Bandung termasuk dalam daftar kota dengan polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat polusi udara Jakarta bahkan 4,5 kali lebih tinggi dari batas aman WHO dan tiga kali lebih tinggi dari standar pemerintah Indonesia (Stevanus, 2019). Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan yang seharusnya membawa kebaikan justru menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.

Masalah ini bisa dilihat melalui pendekatan kenyataan yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Realitas yang ada menunjukkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, sementara seharusnya pembangunan menjaga keberlanjutan lingkungan. Di sinilah refleksi teologis menjadi penting. Selama berabad-abad, Gereja dianggap ikut memperkuat pandangan antroposentris, yaitu pandangan bahwa manusia adalah pusat ciptaan. Pemikiran ini mulai kuat sejak Anselmus dari Canterbury (1033–1109), yang menganggap manusia sebagai ciptaan paling unggul dan sebagai pusat dari rencana penciptaan (Sunarko, 2008). Pandangan ini membuat manusia merasa berhak menguasai dan memanfaatkan alam sekehendaknya.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas isu yang berkaitan dengan tulisan ini. Anggraini (2021) membahas hubungan antara Islam, hak asasi manusia, dan pandangan teosentris serta antroposentris, tetapi tidak menyinggung konteks pembangunan atau teologi Kristen. Kenoba (2022) menyoroti dampak negatif cara berpikir teknokratis terhadap manusia dan

lingkungan, namun tidak membahas akar teologis dari pandangan tersebut. Marianus menunjukkan bahwa teknologi awalnya membawa harapan, tetapi kemudian berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sementara itu, Solang (2023) menawarkan ekoteologi sebagai solusi terhadap cara pandang antroposentris yang eksploitatif terhadap alam.

Tulisan ini menghadirkan dua hal baru. Pertama, tulisan ini tidak menggunakan pendekatan ekoteologi, tetapi justru mengusulkan teosentrisme sebagai cara pandang baru dalam melihat alam ciptaan. Teosentrisme menawarkan dua gagasan utama, yaitu pentingnya melihat ciptaan sebagai satu kesatuan yang utuh (integrasi ciptaan), dan pentingnya menjamin kelangsungan hidup ciptaan (ciptaan berkelanjutan). Kedua, tulisan ini melihat bahwa cara berpikir teknokratis yang dominan dalam pembangunan saat ini berakar dalam pandangan antroposentris, yang belum banyak dikaji dalam kerangka teologis.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teologi kontekstual dalam merespons krisis lingkungan. Melalui pendekatan teosentris, manusia diajak untuk tidak lagi menempatkan diri sebagai pusat ciptaan, tetapi untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah sebagai pusat semesta.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami dan menemukan makna dari suatu fenomena atau persoalan sosial yang sedang diteliti (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Dalam hal ini, penulis tidak hanya memaparkan persoalan yang terjadi, tetapi juga menganalisis penyebab serta dampak dari persoalan tersebut secara mendalam. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah

dikumpulkan, dengan tujuan untuk mengungkap makna dan hubungan antarunsur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka mencakup kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, berita dari media massa, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema pembangunan, krisis ekologis, dan refleksi teologis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali data secara mendalam, sekaligus membangun analisis kritis berdasarkan kajian teori dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya.

Dengan metode ini, tulisan berusaha menyajikan pemahaman yang utuh dan reflektif terhadap persoalan pembangunan dan lingkungan hidup, khususnya dalam terang teologi Kristen kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Paradoks Pembangunan

Isu kelestarian lingkungan hidup semakin menyita perhatian banyak pihak, baik di tingkat internasional maupun nasional. Perubahan iklim, yang sejatinya telah lama diperingatkan oleh para ahli, kini semakin nyata dan jelas mengancam keberlangsungan hidup manusia. Anomali cuaca, kenaikan permukaan air laut, suhu panas ekstrem, mencairnya es di kutub, serta penipisan lapisan ozon merupakan sejumlah persoalan iklim yang kerap diberitakan terjadi di berbagai belahan dunia dan membahayakan kehidupan bersama.

Dalam konteks Indonesia, krisis ekologis telah memunculkan berbagai respons dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat hingga Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Sebagai persoalan universal, krisis ekologis menuntut kesadaran kolektif dan tindakan bersama untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis, khususnya melalui kebijakan pembangunan yang harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Model pembangunan di Indonesia dinilai masih mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul wacana pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perguruan tinggi, yang kemudian menuai berbagai kritik karena dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Salah satu film dokumenter yang cukup menggugah kesadaran publik adalah *Sexy Killers*, karya sutradara Dandhy Laksono, yang diunggah melalui kanal YouTube Watchdoc Image pada 14 April 2019. Film ini menampilkan sisi gelap aktivitas pertambangan di Indonesia bagaimana praktik pertambangan dapat berdampak destruktif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan kesehatan masyarakat.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertambangan justru menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Lebih dari itu, fakta yang mengkhawatirkan adalah bahwa banyak tambang yang beroperasi di Indonesia berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan sejumlah pejabat publik di negeri ini.

Apa yang disampaikan di atas merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan terkait pembangunan dan krisis ekologis. Fakta mengenai memburuknya kondisi lingkungan bukanlah hal yang tidak diketahui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana paradigma rasionalitas teknokrasi mendominasi logika pembangunan di negeri ini. Tuduhan tersebut muncul sebagai respons atas sikap pemerintah yang tetap mempertahankan

pola pembangunan yang tidak berkelanjutan, meskipun dunia tengah mengalami kerusakan akibat krisis ekologis. Pertanyaan yang muncul adalah: apa sebenarnya yang ingin dicapai? Apakah kesejahteraan bersama masih menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah melihat orientasi yang mendominasi pembangunan kita saat ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pembangunan menjadi penting, mendesak, dan relevan untuk dibahas. Kita dapat meninjau model pembangunan selama dua dekade terakhir yang kemudian direfleksikan kembali oleh Bappenas (2023) bekerja sama dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Dalam buku Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005–2045, disadari bahwa meskipun pembangunan selama dua dekade terakhir telah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun belum mencapai hasil yang optimal dari sisi lingkungan dan sosial.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2025, disebutkan bahwa pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan digalakkan oleh pemerintah sebagai agenda bersama ke depan. Pembangunan rendah karbon penting untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, pembangunan berketahanan iklim diagendakan untuk menangani isu global triple planetary crisis, memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan terutama tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) (Kementerian Bappenas, 2024).

Namun demikian, perencanaan yang digalakkan pemerintah tampak bertolak belakang dengan kebijakan yang direncanakan, seperti rencana

membuka kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa kawasan hutan seluas 20,6 juta hektare yang berpotensi menjadi cadangan pangan dan energi akan dibuka (Tempo.co, 3 Februari 2025).

Terdapat kesenjangan signifikan antara rencana dan kebijakan yang diambil. Pemerintah menunjukkan sikap ambivalen, di mana pihak yang merencanakan agenda pembangunan sekaligus mengabaikan perencanaan dan agenda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi maksimal tanpa mempertimbangkan konsekuensi lainnya. Aspek lingkungan tidak menjadi agenda utama dalam prioritas pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan diarahkan semata-mata untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sebesar-besarnya bagi negara. Model pembangunan ini juga memperlihatkan bagaimana dominasi ekonomi pasar menjadi etos pembangunan. Dalam prinsip ekonomi pasar, pemanfaatan sumber daya alam yang utama dan terpenting adalah orientasi pada laba serta akumulasi modal yang sebesar-besarnya (Shiva, 1998).

Pemerintah melalui Bappenas telah menyadari bahwa intensitas pembangunan yang tinggi belum diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan yang memadai. Selama dua dekade terakhir, aspek lingkungan dalam pembangunan belum mendapat perhatian serius, bahkan di tengah krisis lingkungan global. Sementara dunia internasional berupaya mengatasi krisis ekologis, kita justru terus merusak tatanan lingkungan yang ada serta melemahkan nalar publik melalui propaganda. Kasus ini merupakan fenomena gunung es dari model pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama.

Apa artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika disertai masalah sosial serius akibat pengabaian lingkungan dan aspek sosial lainnya? Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika kualitas kehidupan menurun dan malapetaka datang silih berganti melalui berbagai bencana alam (Keraf, 2010).

Rasionalitas Teknokrasi dalam Hubungan dengan Antroposentrisme

Era awal milenium ketiga ditandai dengan perkembangan signifikan di berbagai bidang. Banyak hal yang sebelumnya tidak terduga kini berubah dengan sangat cepat. Semua perubahan ini telah menjadi kenyataan dan menimbulkan konsekuensi yang luas. Di mana-mana, kita menyaksikan arus perubahan yang masif dan cepat. Bahkan, perubahan yang demikian cepat telah menjadi ciri khas atau ciri utama era ini.

Salah satu perubahan yang paling kontras adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ibarat tembakan senapan mesin. Belum sempat menyadari adanya gerakan, tiba-tiba sudah terjadi dan habis begitu saja. Kita yang menarik pelatuk dibuat kaget dan terheran-heran. Demikian pula teknologi, kita belum sempat menikmati dan mengenal teknologi yang ada dengan baik, sudah muncul teknologi baru. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, karena apa yang dianggap mutakhir pada akhirnya juga akan digantikan oleh yang lebih baru. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari, teknologi kemudian menjadi simbol kemajuan dan peradaban umat manusia (Kristianto, 2008). Kemajuan dan peradaban manusia banyak ditentukan oleh teknologi. Akibatnya, ketika banyak hal berubah, kerangka berpikir atau rasionalitas pun perlahan beralih dan memperoleh pemaknaan baru.

Peralihan paradigma inilah yang kemudian mengubah hampir seluruh struktur peradaban yang telah dibangun pada milenium sebelumnya. Paradigma tersebut bersifat khas dan sekaligus membawa perubahan. Di tengah derasnya arus perubahan yang ditandai dengan intervensi teknologi, muncul suatu kerangka berpikir yang determinan, yaitu rasionalitas teknokrasi. Premis dasar teknokrasi mengacu pada perubahan pemaknaan dan praktik politik, baik di tingkat individu maupun institusional. Meski secara etimologis teknokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dan kekuasaan, yang menarik adalah bahwa selain definisi etimologis tersebut, teknokrasi juga merupakan cara berpikir dan kebudayaan yang khas. Ia menjadi suatu kerangka berpikir yang penting (Ignas Kleden, 1984).

Pengertian rasionalitas teknokrasi di sini mengikuti arahan Max Weber. Weber membedakan antara rasionalitas nilai yang berorientasi pada norma dan nilai, dan rasionalitas tujuan yang semata-mata mengarah pada tujuan tindakan. Dalam rasionalitas tujuan berlaku prinsip efisiensi dengan mengejar tujuan sebesar-besarnya. Dengan kata lain, dalam rasionalitas tujuan, nilai dikesampingkan, bahkan bisa dikatakan tidak berlaku sama sekali. Sejalan dengan konsep ini, rasionalitas teknokrasi termasuk dalam rasionalitas tujuan. Ada perbedaan paradigma yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, yang ditekankan adalah cara-cara yang dapat menekan biaya produksi. Maka, efisiensi berubah menjadi suatu nilai (Ignas Kleden, 1984).

Pemerintah dengan gaya pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh rasionalitas teknokrasi, terutama dalam hubungannya dengan alam melalui pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan lebih condong melayani kepentingan manusia. Efisiensi yang sangat didewakan kemudian menjadi bumerang. Pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan, apakah masih mungkin dicapai di tengah berbagai bencana ekologis?

Meningkatnya rasionalitas teknokrasi yang berorientasi pada kepentingan manusia mempertegas dominasi manusia dalam relasinya dengan alam. Dalam rasionalitas teknokrasi, manusia jelas dipandang sebagai pusat dari segala sesuatu, sebagai titik tolak penilaian. Anggapan ini bukan tanpa dasar dan konsekuensi. Sebagai makhluk berakal, manusia mampu menjelaskan sebab keberadaan segala sesuatu dan hanya manusia yang dapat melakukannya. Konsekuensinya, keberadaan makhluk lain sangat bergantung pada manusia. Dalam kerangka berpikir seperti ini, relasi manusia dengan realitas non-manusia sejak awal sudah berpotensi menimbulkan ketimpangan (Baghi, 2009).

Relasi timpang antara manusia dengan alam maupun realitas non-manusia lainnya tidak dapat dilepaskan dari konsep antroposentrisme. Antroposentrisme adalah cara berpikir dan etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat ciptaan. Inilah akar persoalan ketimpangan relasi manusia dengan alam. Antroposentrisme membawa risiko serius karena selalu menempatkan manusia sebagai pihak yang harus dilayani kepentingannya dan sebagai *res cogitans* (makhluk berpikir dengan kedudukan lebih tinggi).

Anggapan bahwa manusia adalah pihak yang selalu dilayani kepentingannya sangat terlihat dalam orientasi pengembangan berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, hingga aktivitas ekonomi cenderung berorientasi pada manusia. Kepentingan manusia selalu menjadi basis pembangunan dalam banyak aspek kehidupan. Dengan logika demikian, dapat dipahami mengapa berbagai program pembangunan cenderung destruktif terhadap alam. Alam lebih sering menjadi instrumen pembangunan.

Antroposentrisme seperti ini sangat berbahaya karena memungkinkan monopoli manusia atas nilai. *Res cogitans* adalah konsekuensi dari monopoli tersebut. Manusia ditempatkan lebih tinggi dari alam. Alam menjadi subordinasi manusia. Manusia merasa berkuasa atas alam. Lebih lanjut, monopoli manusia atas nilai ini menjadi dasar perbedaan antara *view of nature* (pandangan tentang alam) dan *self view of humans* (pandangan tentang diri manusia). Instrumentalisasi alam demi kepentingan manusia mendapat justifikasi dari perbedaan konsep tersebut. Pandangan dan perlakuan terhadap alam sangat bergantung pada cara pandang manusia (Baghi, 2009).

Peralihan Teologis dari Antroposentrisme kepada Teosentrisme

Berbagai masalah dan fenomena destruktif muncul akibat pandangan antroposentris. Hal ini mendesak kita untuk segera beralih kepada konsep teologis penciptaan yang teosentris. Banyaknya persoalan menggugah kita untuk segera mengubah haluan, beralih kepada paham penciptaan yang lebih inklusif, di mana tidak ada tempat bagi dominasi manusia atas ciptaan lain. Pandangan ini memandang ciptaan lain secara adil dan setara. Namun, kemudian muncul pertanyaan: mengapa kita harus beralih?

Peralihan ini menjadi penting, selain untuk menjawab tuduhan bahwa antroposentrisme adalah akar dominasi atas alam dan dasar cara pandang tersebut, juga karena masalah sosial merupakan tanggung jawab dan panggilan khas Gereja di dalam dunia. Di tengah dunia yang diliputi luka, Gereja tidak boleh terperangkap dan terjebak dalam kemapanan.

Ajaran Sosial Gereja (ASG) pertama kali dipromulgasikan pada tahun 1891 oleh Paus Leo XIII melalui ensiklik *Rerum Novarum*. Hal ini menyadarkan kita bahwa Gereja memiliki tanggung jawab sosial yang integral. Melalui ASG, Gereja menegaskan identitasnya bahwa ia bukan sekadar

komunitas religius yang hanya mengurus hal-hal surgawi, yang hanya berlutut di sakristi atau membunyikan lonceng setiap hari Minggu. Lebih dari itu, Gereja siap terjun ke medan persoalan dan diharapkan menjadi agen perubahan untuk mewujudkan kehidupan komunitas dunia yang lebih baik (Riyanto, 2014).

Rerum Novarum sendiri menjadi jawaban sekaligus respons terhadap masalah sosial pada pertengahan abad ke-19. Pada perkembangan selanjutnya, penekanan kembali diberikan oleh Konsili Vatikan II, pertengahan abad lalu. Dalam salah satu dokumen kunci yang membahas peran Gereja di dunia masa kini, *Gaudium et Spes*, ditegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia juga merupakan kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan murid-murid Kristus (Gereja) (*Gaudium et Spes* no. 1). Ini menunjukkan bahwa konsili memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan Kristus kepada Gereja. Meskipun proses kelahiran dokumen ini penuh perdebatan panjang, akhirnya disadari bahwa tugas Gereja di dunia harus segera dijalankan (Kung, 2003).

Menghadapi situasi dunia yang ambruk dan diduga kuat disebabkan oleh pandangan antroposentris, kita harus merefleksikan hal ini secara teologis. Oleh karena itu, peralihan cara pandang dari antroposentrisme ke teosentrisme sangat mungkin dan bahkan mendesak dilakukan. Penting untuk ditegaskan bahwa intervensi Gereja sangat diperlukan mengingat inti kehadiran Gereja di dunia dan dalam sejarah adalah memenangkan kehidupan bagi banyak orang.

Jika antroposentrisme dengan percaya diri menempatkan manusia sebagai mahkota dan pusat ciptaan, maka pandangan teosentris justru menempatkan Allah sebagai awal dan tujuan seluruh ciptaan (*causa finalis*) (Budi Kleden, 2009). Peralihan pandangan ini juga merupakan konsekuensi

logis yang muncul dari eratnya pegangan pada pandangan antroposentris. Pandangan antroposentris pun melahirkan sikap pemboikotan terhadap kesepakatan bersama, yang kemudian diikuti oleh melemahnya kohesi sosial (Harun, 2017).

Dengan demikian, pandangan teosentris mengingatkan kita kembali bahwa meskipun manusia menyadari dirinya sebagai subjek dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia—yang dimulai sejak Anselmus dari Canterbury dan kemudian ditekankan oleh René Descartes melalui konsep *res cogitans*—bukan berarti manusia harus tertutup, diam, atau bahkan bungkam terhadap Tuhan (Magnis-Suseno, 2006). Melalui pandangan penciptaan yang teosentris, seluruh ciptaan selain dianggap sebagai sakramen keselamatan, juga merupakan jejak kaki Allah (*vestigia Dei*) yang nyata dan tampak. Akibatnya, seluruh ciptaan, karena diciptakan, menjadi tanda kehadiran Allah dan karena itu pula ciptaan menjadi berkat (Budi Kleden, 2009). Oleh karena itu, paradigma ciptaan yang berkelanjutan dan integrasi seluruh ciptaan menjadi konsep dasar yang melandasi pandangan teosentris.

Pertama, integrasi seluruh ciptaan. Integrasi ini menjadi tema utama dan poin penting dalam pandangan teosentris di tengah kekacauan akibat antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai ciptaan unggul di atas ciptaan lain. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari teologi penciptaan. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan pada hari keenam (Kejadian 1:26-31). Manusia ditempatkan setelah ciptaan lain terbentuk. Dengan demikian, manusia hadir setelah terbentuknya kosmos, yang berarti keteraturan atau kosmos mendahului manusia. Dengan kata lain, manusia adalah pendatang dalam hunian yang baru (Budi Kleden, 2009).

Penciptaan pada hari keenam atau setelah terbentuknya kosmos membawa penekanan baru bahwa manusia harus memandang ciptaan

terdahulu sebagai saudara dalam kosmos, menghargai hewan dan tumbuhan yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini berbeda dengan cara pandang antroposentris yang tidak menghargai nilai intrinsik ciptaan lain. Konsekuensinya, integrasi seluruh ciptaan menjadi suatu imperatif yang harus dilakukan. Harus terjadi relasi yang erat dalam lingkaran kosmos. Dengan kata lain, keterpautan seluruh ciptaan menjadi kunci utama cara pandang teosentris. Hal ini juga mengakibatkan kesadaran bahwa tindakan destruktif selama berabad-abad adalah bentuk disintegrasi, bahkan pengkhianatan terhadap seluruh ciptaan.

Integrasi seluruh ciptaan juga memungkinkan kita memahami korelasi antar ciptaan. Misalnya, tumbuhan melalui proses alami menyerap karbon dan menghasilkan oksigen yang menopang kehidupan manusia. Hewan berperan menjaga keteraturan melalui rantai makanan. Bagaimana dengan manusia? Kita mengetahui bahwa tanpa manusia, alam dan hewan tetap eksis, bahkan mungkin lebih tenang. Oleh karena itu, manusia harus menyadari posisinya di tengah urgensi peran ciptaan lain dan membutuhkan pertobatan ekologis. Jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, maka Ia menekankan struktur keseimbangan, dan manusia harus memahami bahwa ia sangat bergantung pada ciptaan lain (Lolangion, 2021).

Dengan demikian, penempatan manusia pada hari keenam setelah terbentuknya kosmos menegaskan pesan biblis bahwa manusia harus bertindak adil dan bijak terhadap ciptaan lain. Ciptaan lain bukan objek yang boleh didominasi atau dimanipulasi secara sewenang-wenang, seperti yang terjadi dalam cara pandang antroposentris. Menjadikan ciptaan lain sebagai pionir kosmos, sementara manusia menganggap dirinya mahkota ciptaan,

menjadikan integrasi seluruh ciptaan sebagai dasar pandangan teosentris yang sekaligus menempatkan Allah sebagai episentrum seluruh ciptaan.

Kedua, penciptaan berkelanjutan. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola ciptaan. “Beranaccuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kejadian 1:28). “Menaklukkan” dan “berkuasa” atas ciptaan tidak boleh dipahami dalam arti negatif, keras, dan sewenang-wenang. Dalam Kejadian bab 1, dunia diciptakan dalam keteraturan dan keharmonisan, sehingga perikop ini tidak pernah mendukung eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab, apalagi hingga mengabaikan aspek keberlanjutan ciptaan (Sunarko, 2008).

David Wells (2019) dalam bukunya *The Uninhabitable Earth* menarasikan berbagai situasi keterluakan bumi dalam bab berjudul “Unsur-Unsur Kekacauan”. Kekacauan menjadi kata yang ia pilih untuk merangkum berbagai permasalahan ekologis nyata yang melanda bumi. Dalam ulasannya, tidak sedikit ia menggambarkan dampak buruk dari situasi ini. Keresahan utamanya adalah keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Kekhawatiran ini sangat mendasar jika mempertimbangkan tingkat kesadaran global dalam menangani krisis ekologis.

Kisah penciptaan menunjukkan dimensi waktu dalam prosesnya. Selama enam hari, Allah melakukan karya-Nya dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Antara hari pertama dan hari berikutnya terdapat proses berkesinambungan, yakni penciptaan terus disempurnakan. Hari pertama penciptaan tidak sempurna dalam dirinya sendiri, melainkan menjadi lengkap oleh hari-hari berikutnya.

Dimensi waktu dalam kisah penciptaan mengingatkan kita akan pentingnya ikatan antar generasi. Setiap hari penciptaan memiliki tujuan baik,

namun kebaikan itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan peran dan posisi setiap hari dalam keseluruhan tata ciptaan. Demikian pula, setiap generasi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga dampaknya bagi generasi mendatang.

Penciptaan tidak berpusat pada kepentingan individu, melainkan pada kesatuan dan *communio* seluruh ciptaan yang terus berproses dalam waktu. Oleh karena itu, kita perlu berpikir dan bertindak dalam solidaritas antar generasi, bukan hanya memikirkan kepentingan sekarang. Pengelolaan bumi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan luas, tidak hanya kepentingan kita saat ini dan di wilayah kita sendiri (Budi Kleden, 2009). Keberlanjutan ciptaan adalah bagian dari pengharapan akan keadilan Allah. Allah akan memulihkan ciptaan-Nya, dan keberlanjutan ciptaan merupakan bagian dari proses pemulihan tersebut (Roma 8:18-25).

Kesimpulan

Model rasionalitas teknokratis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Rasionalitas ini berakar pada paradigma antroposentris yang selama berabad-abad mempengaruhi tradisi kekristenan, sehingga Gereja mendapat banyak kritik. Sebagai respons, teologi penciptaan perlu direfleksikan kembali dengan menempatkan Allah sebagai asal dan tujuan seluruh ciptaan, serta melihat ciptaan sebagai jejak kaki-Nya. Pendekatan teosentris ini menegaskan pentingnya integrasi seluruh ciptaan dan keberlanjutan dalam relasi antarciptaan. Oleh karena itu, peralihan paradigma dari antroposentrisme ke teosentrisme menjadi sangat penting dan mendesak, terutama di tengah

berbagai tantangan ekologis dan sosial saat ini, di mana Gereja juga memiliki peran aktif.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai landasan bagi pengembangan teologi lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ciptaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian teologi penciptaan dengan menegaskan relevansi paradigma teosentris dalam konteks krisis ekologis dan sosial.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggali lebih dalam implementasi paradigma teosentris dalam praktik pastoral dan kebijakan lingkungan di berbagai komunitas gerejawi.

Referensi

- Angraini, Reni Dian. (2021). Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme, *Jurnal Ijtihad*, Volume 37, No. 1, 2-10. Diakses melalui <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/101>
- Baghi, F. (2009). Etika Ekologi yang Biosentris. Dalam A. Jebadu et al. (Ed.), *Berkah atau Kutuk*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Fika, D. R. (Ed.). (2025, Februari 3). 100 hari Kabinet Prabowo: Ancaman ekologi di pembukaan lahan 20 juta hektare. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-ancaman-ekologi-di-pembukaan-lahan-20-juta-hektare—1202016>.
- Giri, K. A., & Ufford, P. Q. V. (Eds.). (2004). *Kritik Moral Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harun, M. (Penerj.). (2017). *Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus: Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Kementerian Bappenas. (2023). *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan visi pembangunan 2005–2045*. Kementerian Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/Buku%20Menuju%20Indonesia%20Emas%202045_versicetak.pdf.
- Kementerian Bappenas. (2024). *Rencana kerja pemerintah tahun 2025*. Kementerian Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/Buku%20Menuju%20Indonesia%20Emas%202045_versicetak.pdf.

baru/%7BDIGITAL)%20RENCANA%20KERJA%20PEMERINTAH%20TAHUN%202025.pdf.

- Keraf, A. S. (2010). *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kleden, P. B. (2009). *Tanggapan Teologis Terhadap Persoalan Pertambahan di NTT*. Dalam A.
- Jebadu et al. (Ed.), *Berkah atau Kutuk*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kleden, Ignas. (1984). *Model Rasionalitas Teknokrasi*, *Jurnal Prisma*, Volume 3, 2-12.
- Kristianto, E. (2008). *Sakramen Politik*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.
- Kung, H. (2003). *My Struggle For Freedom* (J. Bowden, Trans.). New York: Continuum.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lolangion, Feldy dkk. (2021). *Menelaah Antroposentris dalam Menyikapi Krisis Lingkungan dari Perspektif Teologi Penciptaan*, *Jurnal Tumou Tou*, Volume 8, No. 1, 1-9. Diakses melalui <https://www.ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/article/view/469>
- Magnis-Suseno, F. (2006). *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ola Kenoba, Marianus. (2022). *Efek Rasionalitas Teknologi terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan*, Volume 11, No. 1, 202-209. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.3734>
- Riyanto, A. (2014). *Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Shiva, V. (1998). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (H. Jhamtani, Penerj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Solang, Ronaldo Novelindo. (2023). *Ekoteologi sebagai Pembebasan Gereja Masa Kini dari Paham Antroposentrisme*, *Jurnal Melo*, Volume 4, No. 2, 37-50. Diakses melalui <https://www.ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/article/view/1672>
- Stevanus, Kalis. (2019). *Pelestarian Alam Sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis Teologis*, *Jurnal Kurios*, Volume 5, No. 2, 94-108. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.107>

ANTROPOSENTRISME, TEKNOKRASI... (WILHELMUS KELVIN & EUGENIUS M DARMAWAN)

- Sunarko, A. (2008). Perhatian Pada Lingkungan: Upaya Pendasaran Teologis. Dalam A. Sunarko & E. Kristiyanto (Eds.), *Menyapa Bumi Menyembah yang Ilahi: Tinjauan Teologis atas Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wallace-Wells, D. (2019). *Bumi Yang Tak Dapat Dihuni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.